

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh antara pendapatan asli daerah, belanja modal, sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2012 s/d 2020. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah *sampling* jenuh.

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, serta hasil pengujian data yang telah dilakukan dengan menggunakan E-views, adalah sebagai berikut:

- a. Variabel Pendapatan Asli Daerah yang diukur menggunakan Rasio Efektivitas PAD menunjukkan hasil yang mengungkapkan bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2012 s/d 2020.
- b. Variabel Belanja Modal yang diukur menggunakan Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja menunjukkan hasil yang mengungkapkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2012 s/d 2020.
- c. Variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang diukur menggunakan Rasio Tingkat Pembiayaan SILPA menunjukkan hasil yang mengungkapkan bahwa Sisa lebih pembiayaan anggaran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2012 s/d 2020.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatas yang dimiliki pada studi yang dilakukan pada penelitian ini , antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan objek penelitian hanya di Provinsi Sulawesi Barat yang hanya memiliki 7 Kabupaten/Kota sebagai sampel, sehingga penelitian ini lebih relevan untuk menilai cakupannya hanya di Provinsi Sulawesi Barat.
- b. Pada penelitian ini hanya memakai 3 variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, belanja modal dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sehingga tidak menggambarkan faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini yang mengacu pada hasil analisis, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
 - 1) Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan kinerja keuangan daerah di provinsi lain karena di Indonesia terdapat ada 34 provinsi lainnya, bahkan dapat mengembangkan batas objek penelitian tidak hanya batas provinsi, dapat menambah batas pulau atau seluruh provinsi di Indonesia.
 - 2) Untuk penelitian selanjutnya, dimungkinkan untuk mengkaji dan menyertakan variabel independen lainnya yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah selain Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.
- b. Secara Praktis
 - 1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat .
 - a. Proporsi terbesar pada APBD Sulawesi Barat adalah berasal dari Dana Transfer Pusat, oleh sebab itu sebaiknya perlu mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerahnya melalui sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terutama pada sector perkebunan sawit, selain itu perlu dikembangkan dari sektor lain yaitu peningkatan penerimaan perpajakan yang dapat digunakan pemerintah untuk membiayai belanja negara dalam rangka pembangunan.

- b. Realisasi belanja di Sulawesi Barat didominasi untuk sektor konsumtif yaitu untuk belanja pegawai, sedangkan selebihnya baru untuk sektor produktif yaitu belanja modal, oleh sebab itu sebaiknya pemerintah meningkatkan proporsi belanja sektor produktif dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur maka dapat menstimulasi kegiatan investasi di daerah dan akan berpengaruh pada perkembangan daerah, serta dapat menurunkan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat.
 - c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran di Sulawesi Barat mempresentasikan Sisa kas yang mencapai pendapatan daerah atas realisasi belanja daerah, oleh sebab itu sebaiknya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dapat diminimalisir dengan menaikkan belanja daerah khususnya belanja sector produktif.
- 2) Pemerintah daerah harus dapat mengorganisasikan dan mengembangkan potensi sumber daya pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah, salah satunya adalah belanja modal yang digunakan untuk membangun infrastruktur penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat meminimalkan derajat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Hal ini dapat memberikan indikasi bahwa pemerintah daerah telah memiliki kinerja yang baik dalam mengelola keuangannya.
 - 3) Pemerintah Pusat, memberikan kebebasan dan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengelola dan menggunakan APBD sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat setempat sehingga tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat berkurang.